

Penanganan Konflik Masyarakat Adat Papua Barat Melalui Pendekatan Antropologi Oleh Tentara Nasional Indonesia

Arief Fahmi Lubis

Sekolah Tinggi Hukum Militer (PTHM/AHM) Jakarta
arieffahmilubis0@gmail.com

Abstract

The surrounding community felt scared, threatened and fled to the forests. The Regent of Maybrat called on the people who were still displaced to return to their respective homes or villages. The addition of TNI personnel there was not a military operation but rather looking for the perpetrators of the theoretic crime because it had caused tremendous fear in the local community and fled into the forest. The purpose of this study is to examine the subject matter according to the scope and identification of dilemmas as mentioned above through a normative juridical approach. In addition, researchers will also equip it with juridical-historical and juridical-political according to the scope and identification of existing problems. The research uses the normative rule research method and the reality rule research method at the same time. however, the researcher will focus more on this research on normative legal research, while the reality law research will serve as supporting information. TNI always tries to eliminate the culture of the Arfak mountain community which makes daily activities clash with criminal acts or crimes such as firearms as a dowry by using various anthropological approaches. This approach helps the people of West Papua to be carried out entirely by soldiers in the field within the framework of territorial operations in the aspect of training and raising so as to raise public awareness, and enforce national laws within the West Papuan community.

Keywords: military, law, West Papua, TNI, anthropology, conflict

Abstrak

Masyarakat sekitar merasa ketakutan, terancam dan mengungsi ke hutan-hutan. Bupati Maybrat menyerukan kepada masyarakat yang masih mengungsi agar kembali ke rumah atau kampungnya masing-masing. Penambahan personel TNI di sana bukanlah operasi militer melainkan mencari para pelaku tindak pidana teorisme karena telah menyebabkan ketakutan luar biasa pada masyarakat setempat hingga mengungsi kedalam hutan. Tujuan penelitian ini menelaah pokok permasalahan sesuai menggunakan ruang lingkup dan identifikasi dilema sebagaimana yang telah disebutkan pada atas melalui pendekatan yuridisnormatif. Selain itu, peneliti pula akan melengkapinya dengan yuridis-historis dan yuridis-politis sesuai ruang lingkup dan identifikasi masalah yg ada. Penelitian mempergunakan metode penelitian aturan normatif serta metode penelitian aturan realitas sekaligus. tapi, peneliti akan lebih menitikberatkan penelitian ini pada penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum realitas berfungsi menjadi informasi pendukung. TNI selalu berusaha menghilangkan kebudayaan masyarakat pegunungan Arfak yang menjadikan kegiatan sehari hari berbenturan dengan tindakan kriminal atau kejahatan seperti senjata api sebagai mas kawin dengan berbagai cara pendekatan antropologi. Pendekatan tersebut membantu rakyat Papua Barat dijalankan sepenuhnya oleh para prajurit di lapangan dalam kerangka operasi teritorial dalam aspek training serta penggalangan sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat, serta menegakkan hukum nasional dilingkungan masyarakat Papua Barat.

Kata kunci: militer, hukum, Papua Barat, TNI, antropologi, konflik

© 2022 Jurnal Pustaka Mitra

1. Pendahuluan

Insiden penyerangan Posramil Kisor, Maybrat Provinsi Papua Barat yang mengakibatkan tewasnya 4 Prajurit TNI AD terbaik, sebelumnya sudah direncanakan. Salah satu tersangka mengakui adanya rapat sebanyak dua kali, sebelum mereka menyerang. Bupati Maybrat, Bernard Sagrim menyatakan penyerangan Pos Ramil Kisor yang menewaskan empat anggota TNI AD merupakan kasus tersadis sepanjang sejarah kabupaten tersebut. Penyerangan dan pembantaian anggota TNI AD tersebut baru kali ini terjadi di Maybrat. Pertikaian lokal sering terjadi tapi tidak sesadis kasus penyerang Posramil Kisor. Bupati Maybrat menyerahkan penyelesaian perkara tersebut kepada kepolisian RI guna mengusut untuk mengetahui siapa dan dari kelompok mana yang melakukan perbuatan tersebut. Posramil Kisor diserang oleh sekitar 20 orang dari Kelompok Separatis Teroris pada Kamis (2/9/2021). Akibatnya, empat prajurit TNI gugur dalam insiden tersebut. Tindakan ini tergolong pembunuhan berencana. Pelaku akan dijerat Pasal 340 KUHP sub pasal 338 jo pasal 55 ayat 1 ke 1E dan 56 ayat 1 ke 1E.

Masyarakat sekitar merasa ketakutan, terancam dan mengungsi ke hutan-hutan. Bupati Maybrat menyerukan kepada masyarakat yang masih mengungsi agar kembali ke rumah atau kampungnya masing-masing. Penambahan personel TNI di sana bukanlah operasi militer melainkan mencari para pelaku tindak pidana terorisme karena telah menyebabkan ketakutan luar biasa pada masyarakat setempat hingga mengungsi ke dalam hutan. Menghadapi situasi tersebut, bagaimanakah strategi TNI dalam menangani konflik di wilayah Papua Barat.

2. Metode Pengabdian Masyarakat

Pengabdian ini mengimplementasikan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan mempelajari pokok pertarungan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana yang sudah disebutkan di atas melalui pendekatan yuridis normatif. Selain itu, juga akan melengkapinya menggunakan yuridis-historis dan yuridis-politis sesuai ruang lingkup dan identifikasi tindak pidana yang ada. Untuk menyelidiki utama konflik dalam penelitian ini, mempergunakan metode penelitian hukum normatif [1] dan metode penelitian hukum empiris sekaligus. Tapi, akan lebih menitikberatkan pada hukum normatif, sedangkan penelitian aturan realitas berfungsi menjadi informasi pendukung.

3. Hasil dan Pembahasan

Merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. KKB yang marak terjadi di Tanah Papua membuat pemerintah menciptakan regulasi baru. Terakhir, ada Peraturan Presiden (Perpres) No 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme Berbasis Kekerasan. Perpres ini diharapkan agar dapat menjadi instrumen yang ampuh dalam rangka mencegah dan memberantas aksi terorisme di Indonesia. Publik dan pemerintah menduga apa motif sehingga KKB mampir di Tanah Papua Barat.

Sebagian publik menyakini bahwa tindakan kriminal dari gerombolan Kriminal Bersenjata yang terjadi pada warga Papua bermula dari enam latar majemuk motif yaitu, pertama, dendam eksklusif karena kerabat atau orang tua terbunuh pada perseteruan, ke 2, motif ekonomi, karena mereka umumnya pengangguran. Ketiga, menikmati keberadaan diri serta grup. Keempat, dimanfaatkan buat mengganggu lawan politik dalam pilkada. Kelima, menarik perhatian supaya menerima proyek bisnis. Keenam, dimanfaatkan menjadi bagian asal perebutan deposit emas.

3.1. Penetapan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sebagai Kelompok Separatis Teroris

Latar Belakang motif di atas, semuanya masuk pada air keruh duduk perkara sosial. Tidak galat, bila hal tersebut terjadi di tanah Papua sebab Papua itu, selain kaya akan asal daya alam, kaya juga akan rentan persoalan terpuruk sosial lainnya. Kemiskinan, politik, kekeluargaan dan pengangguran merupakan problem yg nampak di mata publik. Perspektif penulis, Poblema Papua yaitu berita KKB jua ditimbulkan sebab ada segelintir orang yang kontra-Republik Indonesia [2].

Operasi penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan KKB-KSB/TPN-OPM hendaknya berkoordinasi secara intensif menggunakan Pemerintah Daerah juga para tokoh rakyat setempat. Langkah tadi ditujukan buat menghindari jatuhnya korban dari masyarakat sipil yang tidak bersalah. KKB yang terjadi di Tanah Papua tentu sangatlah menghambat kenyamanan masyarakat pada sana.

seluruh aktivitas bebas yg biasa dilakukan setiap hari sebelumnya, sekarang disekat menggunakan tembok kekerasan serta pembunuhan yg dilakukan KKB. Tindakan kekerasan dan penghilangan nyawa yang dilakukan KKB pada Papua, rakyat sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Polri artinya objek yg menjadi primer serangan asal gerombolan ini. KKB berhasil menghantui warga di sana dengan aksi kriminal mereka. Tindakan kriminal yg dilakukan KKB sangat berpengaruh jelek pada psikis, emosional dan mental masyarakat Papua Barat.

Pemerintah Indonesia sudah memutuskan gerombolan Kriminal Bersenjata (KKB) pada Papua menjadi organisasi teroris. Penetapan ini tak lepas asal aktivitas KKB yang selama ini kerap melakukan pelanggaran tindak pidana, misalnya penghilangan nyawa serta kekerasan secara masif nan brutal. Tindakan kelompok ini telah mempuk terhadap masyarakat di Papua Barat.

3.2. Mendahulukan Pendekatan Adat Sesuai Tradisi Masyarakat Setempat Sebagai Pendekatan Antropologi.

Meskipun pemerintah telah memutuskan organisasi KKB-KSB ataupun TPN-OPM menjadi teroris, operasi penegakan aturan hendaknya permanen mendahulukan pendekatan persuasif dibarengi menggunakan pendekatan adat sinkron tradisi rakyat setempat sebagai Pendekatan Antropologi dibanding pendekatan keamanan. Selain itu, otoritas keamanan pada lapangan hendaknya permanen menyampaikan kesempatan kepada kepala wilayah setempat buat membentuk komunikasi serta mempersuasi masyarakat warga yg mendukung KKB-KSB/TPN-OPM buat sadar serta balik mendukung NKRI.

Pendekatan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia, yang dalam kajiannya mengedepankan 2 (dua) konsep penting yaitu Holistik dan Komperatif. Kajian antropologi sangat memperhatikan sejarah serta penerangan meyeluruh buat mendeskripsikan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial ilmu hayati (alam) serta jua humaniora. Antropologi pula memakai kajian ilmu lintas-budaya dalam menekankan dan menyebutkan disparitas antara grup-kelompok manusia pada perspektif material budaya, sikap sosial, bahasa serta etos. Salah satu kebudayaan masyarakat pegunungan Arfak Manokwari menjadikan senjata api sebagai mahar kawin. TNI selalu berusaha menghilangkan kebudayaan masyarakat pegunungan Arfak yang menjadikan senjata api sebagai mas kawin dengan berbagai cara pendekatan seperti menyampaikan bantuan fisik buat membantu pembangunan wilayah sekaligus berperan menjadi guru di sekolah-sekolah yang terpencil pada pelosok Papua. poly jua prajurit TNI yang bertugas menjadi energi medis membantu penyuluhan kesehatan serta pertolongan pertama pada kecelakaan. Pendekatan tersebut membantu warga Papua Barat dijalankan sepenuhnya oleh para

prajurit pada lapangan dalam kerangka operasi teritorial dalam aspek pelatihan dan penggalangan sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat menyerahkan senjata api yang disimpan dan kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat adat yang berpotensi menimbulkan konflik dan rasa tidak aman.

Banyak pengamat dari dalam dan luar negeri yang memberi apresiasi peran TNI tersebut. Apa yang sedang terjadi saat ini dapat dikatakan sebagai *unintended consequence* atas suatu dinamika relasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah setempat. Kejelian aparat di lapangan membaca situasi dan kondisi sosial masyarakat Papua Barat justru berhasil melokalisasi permasalahan tidak berkembang menjadi ekse yang berujung konflik. Keberanian pimpinan TNI didukung pihak Polri merupakan kunci keberhasilan meredam berbagai hoax.

Pendekatan Antropologi tersebut dapat menjadi media komunikasi dalam mensikronkan enam latar majemuk motif yaitu, pertama, dendam eksklusif karena kerabat atau orang tua terbunuh pada perseteruan, ke 2, motif ekonomi, karena mereka umumnya pengangguran. Ketiga, menikmati keberadaan diri serta grup. Keempat, dimanfaatkan buat mengganggu lawan politik dalam pilkada. Kelima, menarik perhatian supaya menerima proyek bisnis. Keenam, dimanfaatkan menjadi bagian asal perebutan deposit emas, jika melihat data jumlah konflik yang terjadi sejak tahun 2016 (sebelum di didirikannya TNI) mencapai 126 kejadian konflik dalam 1 (satu) semester dari skala kecil berupa pemalangan jalan, pemadaman listrik secara paksa oleh sekelompok masyarakat, demo di depan kantor-kantor pemerintahan, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 lalu jumlah konflik di wilayah Papua Barat hanya berkisar 25 kejadian dalam 1 (satu) semester sehingga tingkat efektifitasnya penurunan penanganan konfliknya cukup tinggi mencapai 80% dari jumlah konflik yang selama ini terjadi di wilayah Prov. Papua Barat.

Beberapa contoh pendekatan antropologi lainnya, TNI menginisiasi melalui kegiatan ketahanan pangan kampus-kampus di wilayah Papua Barat, selain dapat membantu adik-adik mahasiswa dalam pemenuhan gizi dan alternatif sayuran untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat di wilayah Papua Barat.

lalu pendekatan antropologi dengan program pelatihan Kerukunan Umat Beragama kepada Tentara Nasional Indonesia khususnya TNI AD, keluarga akbar TNI (KBT) dan lingkungan warga sehingga tercipta Persatuan dan Kesatuan Bangsa. kegiatan training Kerukunan Umat Beragama dilaksanakan dengan tujuan agar prajurit Tentara Nasional

Indonesia, keluarga besar Tentara Nasional Indonesia (KBT), Tokoh agama serta Tokoh Pemuda sah – benar memahami tentang arti toleransi umat beragama. sasaran dari kegiatan ini untuk mewujudkan solidaritas kerukunan antar umat beragama sehingga dapat terhindar berasal konflik sosial antar umat beragama yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

kemudian, Pemerintah Daerah perlu didorong buat menginisiasi atau mengaktifkan sistem keamanan kampung. Caranya menggunakan membentuk aparat keamanan kampung melibatkan tokoh rakyat serta pemuda-pemudi setempat. Penerapan pendekatan keamanan hendaknya tetap dibarengi dengan proses-proses pendekatan kesejahteraan serta pemenuhan kebutuhan dasar warga secara nyata, tidak berhenti pada kebijakan serta program semata. pemda diharapkan bersinergi serta secara serius menyampaikan perhatian terhadap penanganan pengungsi yg jumlahnya terus bertambah seiring menggunakan meningkatnya eskalasi kekerasan di beberapa daerah.

Dalam wilayah tertentu di Indonesia, sistem hukum adat juga perlu diterapkan dalam hukum negara karena hukum adat merupakan bahan hukum asli Indonesia atau realitas hukum atas berbagai prinsip yang nyata berlaku di dalam suatu masyarakat Papua Barat. TNI juga selalu melaksanakan pendekatan antropologi dengan komunikasi aktif dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) setempat, selalu berdiskusi bersama para pemuka adat agar terjalin hubungan batin yang kuat antara TNI dan masyarakat. Lembaga Masyarakat Adat merupakan hukum yang hidup dilingkungan masyarakat sehingga hubungan tersebut dilakukan untuk meyelaraskan visi misi yang belum sinkron atau belum tepat diterima oleh masyarakat Papua Barat.

4. Kesimpulan

Tindakan kriminal dari kelompok Kriminal Bersenjata yg terjadi pada warga Papua bermula asal enam latar majemuk motif yaitu, pertama, dendam

eksklusif sebab kerabat atau orang tua terbunuh pada permasalahan, kedua, motif ekonomi, karena mereka biasanya pengangguran. Ketiga, menikmati keberadaan diri serta kelompok. Keempat, dimanfaatkan buat mengganggu lawan politik pada pilkada. Kelima, menarik perhatian supaya menerima proyek usaha. Keenam, dimanfaatkan sebagai bagian asal perebutan deposit emas. Jika melihat data jumlah konflik yang terjadi sejak tahun 2016 mencapai 126 kejadian konflik dalam 1 (satu) semester dari skala kecil berupa pemalangan jalan, pemadaman listrik secara paksa oleh sekelompok masyarakat, demo di depan kantor-kantor pemerintahan, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 lalu jumlah konflik di wilayah Papua Barat hanya berkisar 25 kejadian dalam 1 (satu) semester sehingga tingkat efektifitasnya penurunan penanganan konfliknya cukup tinggi mencapai 80% dari jumlah konflik yang selama ini terjadi di wilayah Prov. Papua Barat.

Daftar Rujukan

- [1] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet. V, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [2] I Gede A.B Wiranata, 2002, Antropologi Budaya, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- [3] Leonard Seregar. 2002. Antropologi dan Konsep Kebudayaan. Universitas Cendrawasih Press. Jayapura.
- [4] <https://www.kompasiana.com/lusita39417/5daf17b70d82307085793402/papua-kaya-sumber-daya-alam-tetapi-kemiskinan-tinggi>
- [5] <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/30/14270581/mah-fud-mit-bukan-gerakan-keagamaan-tapi-gerakan-kejahatan>.
- [6] <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/08/pola-pendekatan-panglima-tni-soal-penanganan-konflik-papua-dapat-apresiasi>
- [7] <http://porosrakyatnews.com/2021/12/07/ini-yang-dilakukan-kodam-kasuari-ke-personil-bko-teritorial-koramil-persiapan-gelombang-iii/>
- [8] <https://papua.inews.id/berita/kodam-xviii-kasuari-dan-unipa-kolaborasi-buat-program-ketahanan-pangan-mahasiswa>
- [9] <https://predikatnews.com/2>